# Terima Kunjungan Duta Besar Uni Eropa, Menko Airlangga Matangkan Persiapan Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa

Image not found or type unknown

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

**SIARAN PERS**
HM.4.6/168/SET.M.EKON.3/05/2023

**Terima Kunjungan Duta Besar Uni Eropa, Menko Airlangga Matangkan Persiapan Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa**

**Jakarta, 24 Mei 2023**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan *Deputy Prime Minister/Minister for Plantation and Commodities* Malaysia, H.E. Dato' Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof direncanakan akan menghadiri rangkaian kegiatan *Joint Mission* ke Uni Eropa (UE) di Brussels, Belgia pada tanggal 30 – 31 Mei 2023.

Sebelum keberangkatan, Menko Airlangga sebagai Ketua Delegasi RI berkesempatan melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E Mr. Vincent Piket pada Rabu (24/05), untuk membahas berbagai persiapan program dan kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia dan Malaysia selama di Brussels, Belgia.

Kegiatan *Joint Mission* merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral kedua menteri pada bulan Februari 2023 lalu dan bertujuan untuk menyuarakan *concern* kedua negara kepada sejumlah pejabat Komisi dan legislator Parlemen Eropa terhadap kebijakan regulasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang dinilai diskriminatif dan akan berdampak negatif pada akses pasar sejumlah komoditas, terutama kelapa sawit ke Uni Eropa. Dalam Misi tersebut juga akan diidentifikasi dan dibahas langkah-langkah yang dapat ditempuh agar ketentuan tersebut tidak akan membebani dan memberikan dampak negatif terutama kepada para pelaku petani kecil (*smallholders*) kelapa sawit dan komoditas lainnya yang berdampak atas ketentuan EUDR tersebut.

"Kami ingin menekankan bahwa EUDR membebani petani kecil, karena mereka harus mematuhi prosedur administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan regulasi tersebut," ujar Menko Airlangga. Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa peraturan ini dapat mengecualikan peran penting petani kecil dalam rantai pasokan global dan gagal untuk mengakui signifikansi dan hak mereka.

Dalam kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membahas *state of play* Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) sebagaimana telah dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen saat pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima pada 21 Mei 2023 lalu agar dapat segera diselesaikan dengan target akhir tahun ini atau paling lambat di awal tahun 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat dan berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penyelesaian perundingan sesuai target yang ditetapkan kedua *Leaders* dimaksud.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah dan Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan. Adapun Duta Besar

Uni Eropa didampingi oleh pejabat terkait Kedubes Uni Eropa di Jakarta. (fwh/frn/dep2/dep7/ltg/fsr/hls)

***

**Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**
**Susiwijono Moegiarso**

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia